

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP PGRS/PARAKU 1963-1967**

**M.S. Mitchel Vinco**

**A. Pendahuluan**

Setelah hanya menjadi “buah bibir” sejak 1960, ide mengenai penggabungan wilayah-wilayah koloni Inggris di Asia Tenggara dan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) mendapat kejelasan ketika Perdana Menteri (PM) PTM, Tunku Abdul Rahman, mengungkapkan gagasan mengenai Negara Malaysia yang meliputi PTM, Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah, pada tanggal 27 Mei 1961 di depan *Foreign Correspondent Association* di Singapura.<sup>1</sup> Lima bulan berselang, pada tanggal 13 Oktober 1961 diadakan pertemuan antara Tunku Abdul Rahman dan PM Inggris Harold MacMillan di London dengan hasilnya yang terpenting adalah membentuk panitia penyelidikan yang akan mengumpulkan data-data pendapat rakyat mengenai rencana pembentukan Malaysia. Sebagai tindak lanjut, bulan Januari 1962 dibentuk panitia penyelidik yang dinamakan *Fact-Finding Commission* yang diketuai Lord Cobbold.<sup>2</sup>

Setelah mengadakan dengar pendapat dari 19 Februari sampai 17 April 1962, Komisi Cobbold mengeluarkan laporan yang dimuat dalam *Report of the Commission of Inquiry, North Borneo and Sarawak*. Hasilnya mengungkapkan dua pertiga masyarakat yang diwawancarai menyetujui penggabungan.<sup>3</sup> Pada tanggal 18-31 Juli 1962 di London diadakan pertemuan lagi antara perwakilan PTM dan Inggris yang hasilnya menyetujui rekomendasi Komisi Cobbold dan merencanakan 31 Agustus 1963 sebagai hari lahirnya Malaysia.<sup>4</sup>

Pada tanggal 8 Desember 1962 di Brunei muncul gerakan yang menolak gagasan pembentukan Malaysia. Syekh A.M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, partai terbesar di Brunei<sup>5</sup>, memproklamkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) dan membentuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Azahari mengklaim wilayah NNKU meliputi daerah Sarawak, Brunei dan Sabah.<sup>6</sup> Di daerah lain, seperti PTM, Singapura dan Sarawak juga terdapat partai-partai politik yang tidak setuju dengan pembentukan Malaysia, diantara dapat disebutkan: *Labour Party*, Partai Rakyat dan *Socialis Front* dari PTM; Singapura *Congres*, Partai Rakyat Singapura, *Labour Party* dari Singapura; *Sarawak United People*

---

*M. S. Mitchel Vinco, adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah periode 2004-2009.*

<sup>1</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *Tanjungpura Berjuang*, Pontianak, Kodam XII Tanjungpura, 1970, hlm. 182. Sebelumnya gagasan mengenai penggabungan PTM dan Singapura ditolak oleh Tunku Abdul Rahman, dengan alasan komposisi etnis Melayu lebih kecil dibandingkan etnis Cina.

<sup>2</sup> Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 88. Lihat juga SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 157.

<sup>3</sup> Baskara T. Wardaya, *Cold War Shadow*, Yogyakarta, Galang Press, 2007, hlm. 362. Lihat juga James P. Ongkili, *Nation-Building in Malaysia 1946-1974*, Singapura, Oxford University Press, 1985, hlm. 165.

<sup>4</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 158.

<sup>5</sup> Partai Rakyat Brunei didirikan oleh Azahari pada tahun 1956. Pada pemilihan umum bulan Agustus 1962 memenangkan lima puluh (50) dari lima puluh empat (54) kursi yang diperebutkan. Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>6</sup> Soemadi, *Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*, Pontianak, Yayasan Tanjungpura, 1974, hlm. 53.

Party (SUPP) dari Sarawak.<sup>7</sup>

Di kemudian hari, tarik menarik kepentingan dan perbedaan sikap antara pihak yang pro dan kontra terhadap pembentukan Malaysia, akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan, yang melibatkan dunia internasional. PTM yang kemudian membentuk Federasi Malaysia, yang didukung Inggris dan negara-negara sekutunya berhadapan dengan gerakan Azahari dan kelompok SUPP dari Sarawak, yang didukung Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina. Pada bulan Desember 1963 di Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, kelompok-kelompok yang menentang Malaysia kemudian membentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, yang akrab disebut PGRS/PARAKU, sebagai usaha konsolidasi untuk terus menentang usaha pembentukan Malaysia.<sup>8</sup>

## **B. Reaksi Indonesia Terhadap Rencana "Malaysia"**

Pada awalnya Indonesia tidak berkeberatan dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Dalam surat kepada *New York Times*, tanggal 17 November 1961, Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio menyatakan dukungan terhadap rencana "Malaysia":

*"As an example of our honesty and lack of expansionist intent, one-fourth of the island of Kalimantan (Borneo), consisting of three Crown Colonies of Great Britain, is now becoming the target of the Malayan Government for a merger... Still, we do not show any objection toward this Malayan policy of merger. On the contrary, we wish the Malayan Government well if it can succeed with this plan"*<sup>9</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat ketika Soebandrio berpidato di hadapan Majelis Umum PBB, 20 November 1961:

*"When Malaya told us of their intentions to merge with the three British Crown Colonies... We told them that we have no objections and that we wish them success... Indonesia had no objections to merger based on the will of the people concerned"*<sup>10</sup>

Sikap Pemerintah Indonesia berbalik arah ketika Azahari memproklamkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962. Bagi Indonesia pecahnya perlawanan yang dikobarkan Azahari menunjukkan tidak semua masyarakat di koloni Inggris setuju dengan rencana "Malaysia". Soekarno mengakui bahwa dia menerima pembentukan Malaysia ketika gagasan tersebut diperkenalkan pada 1961. Tetapi revolusi anti Malaysia di Brunei tahun 1962 tidak memberinya pilihan lain selain membantu Brunei, sebab Soekarno percaya bahwa setiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri.<sup>11</sup>

Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Soebandrio mengumumkan sikap Pemerintah yaitu konfrontasi terhadap "Malaysia":

*"Now the President has decided that henceforth we shall pursue a policy of confrontation against Malaya. This does not mean that we are going to war. This is not necessary... I, too, consider it as normal that we have to adopt a*

<sup>7</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 159-160.

<sup>8</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 182 dan lihat juga Soemadi, *op. cit.*, hlm. 57.

<sup>9</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 363.

<sup>10</sup> *Idem.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 364.

*policy of confrontation. What is to be regretted is that the confrontation policy has to be adopted against an Asian country, a neighboring country. We have always been pursuing a confrontation policy against colonialism and imperialism in all its manifestations. It is unfortunate that Malaya, too, has lent itself to become tools of colonialism and imperialism. That is why we are compelled to adopt a policy of confrontation.”*<sup>12</sup>

Menurut buku sejarah Kodam XII/Tanjungpura, Tandjungpura Berjuang, sikap Indonesia yang menentang pembentukan Malaysia berhubungan dengan politik luar negerinya yang anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya.<sup>13</sup> Indonesia menganggap pembentukan Malaysia hanya kedok dari Inggris dan sekutunya untuk tetap berkuasa di Asia Tenggara dalam bentuk neo-kolonialisme, dan kemudian mengepung Indonesia. Menurut M.C. Ricklefs, banyak pemimpin Indonesia menganggap Malaya (PTM) tidak benar-benar merdeka karena tidak terjadi suatu revolusi. Mereka merasa tidak senang dengan keberhasilan Malaya di bidang ekonomi, merasa curiga dengan tetap hadirnya Inggris di sana dengan pangkalan-pangkalan militernya, dan merasa tersinggung karena Malaya dan Singapura membantu PRRI.<sup>14</sup>

Selain itu dapat pula ditambah alasan adanya keinginan agar Indonesia memainkan peran yang lebih besar di dalam masalah-masalah Asia Tenggara. Hal serupa dikemukakan Hilsman dalam bukunya *To Move a Nation* seperti yang dikutip dari *Cold War Shadow*:

*“Indonesia’s opposition to Malaysia was part of the country’s expression of ‘new nationalism’ in which Jakarta wanted to stand tall in international affairs, particularly in dealing with former colonial power... Sukarno, moreover, was offended that the British never adequately consulted Indonesia on the federation plan”*<sup>15</sup>

Reaksi Indonesia yang menentang pembentukan Malaysia mendapat dukungan yang besar dari rakyat Indonesia. PKI mengancam rencana “Malaysia” sebagai “neo-colonialist attempt to prevent the people of the former British colonies from attaining ‘genuine national independence and freedom from imperialism’”<sup>16</sup> Angkatan Darat (ABRI-AD) mendukung sikap Presiden Soekarno, tapi dalam kasus akan munculnya bahaya komunisme yang lebih kuat. “The Army feared that in light of the federation’s Chinese population, Malaysia could become a springboard for Communist China’s penetration of Indonesia through the Indonesian-Malaysian common borders”<sup>17</sup> Mengenai berdirinya NNKU, pimpinan Azahari, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Indonesia menyatakan “Indonesia had no intention to take over northern Borneo territories, but at the same time would support any movement for self-determination and againts colonialism”<sup>18</sup>

Selain dari dalam negeri, Indonesia juga mendapat dukungan dari Filipina. Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengklaim Sabah sebagai bagian dari wilayah negaranya atas dasar hubungan antara Filipina dan Sultan Sabah pada masa pra-kolonial. Filipina juga takut bahwa federasi baru itu akan menjadi basis bagi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 368.

<sup>13</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 161.

<sup>14</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi: Jakarta, 2005, hlm. 537.

<sup>15</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 366-367.

<sup>16</sup> *Idem.*

<sup>17</sup> *Idem.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 369.

tekanan komunis dari populasi Cina Malaysia dan elemen komunis Indonesia." *The Philippines also feared that the new federation could become a basis for communist penetration Malaysia's Chinese population and Indonesia's communist elements*"<sup>19</sup> Meskipun demikian, Filipina tetap ingin bertindak bersama Indonesia, yang oleh banyak kalangan di negara itu dipandang sebagai calon negara kuat di Asia Tenggara pada masa datang, selain itu Indonesia juga dianggap bebas dari pengaruh kekuasaan kolonial Barat.<sup>20</sup>

### C. Terbentuknya PGRS/PARAKU

Keberadaan PGRS/PARAKU berkaitan dengan situasi politik di sekitar pembentukan Malaysia. Pada tanggal 8 Desember 1962, sebagai bentuk penolakan terhadap Federasi Malaysia, berdiri Negara Nasional Kalimantan Utara dengan Perdana Menteri Azahari dari Partai Rakyat Brunei. Setelah itu didirikan juga Tentara Nasional Kalimantan Utara sebagai kekuatan pertahanan NNKU. Wilayah yang diklaim sebagai wilayah negaranya adalah Sarawak, Brunei dan Sabah, yang meliputi seluruh wilayah jajahan Inggris di Kalimantan/Borneo Inggris.

Negara Nasional Kalimantan Utara pimpinan Azahari mendapat tantangan dari Pemerintahan PTM dan Inggris. Gerakan Azahari tersebut dianggap gerakan separatis oleh pihak yang pro dengan Federasi Malaysia. Inggris yang pro dengan "Malaysia" mengerahkan tentara untuk melawan NNKU. Hal tersebut mengakibatkan Azahari tidak mampu mempertahankan pemerintahan pusat di Kalimantan Utara. Kemudian pemerintahan pusat NKKU dipindahkan ke Manila.

Menurut pandangan Indonesia, terbentuknya NNKU merupakan suatu bentuk gerakan nasionalisme yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Pemerintah Indonesia mendukung gerakan Azahari tersebut dan memberi peluang bagi NNKU untuk menyusun kekuatan dengan mengambil basis di wilayah Indonesia, yaitu Kalimantan Barat.<sup>21</sup> Kebijakan Pemerintah Indonesia saat itu memberikan *asylum* politik kepada Perdana Menteri Azahari dan Panglima Abang Kifli di Jakarta.<sup>22</sup>

Berdirinya Negara Kalimantan Utara mengakibatkan Partai Komunis Sarawak juga mendapat tekanan dari penguasa.<sup>23</sup> Sejalan dengan kebijaksanaan politik Indonesia waktu itu, pemimpin-pemimpin komunis dari Sarawak "hijrah" ke Kalimantan Barat. Sedangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam rangka menyelamatkan Partai Komunis Sarawak mengirimkan Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok ke Kalimantan Barat pada awal tahun 1963.<sup>24</sup> Kedua pemimpin Partai

---

<sup>19</sup> *Idem.*

<sup>20</sup> Periksa Pidato Presiden Philipina di KTT Manila, 30 Juli 1963. Departemen Penerangan RI, *Gelora Konfrontasi Menggajang Malaysia*, Jakarta, Departemen Penerangan, 1964, hlm. 33.

<sup>21</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 53-54.

<sup>22</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm 233.

<sup>23</sup> Partai Komunis Serawak adalah SCO (*Serawak Communist Organization*), partai yang ilegal, semacam "PKI malam" di Indonesia pasca 1965. SCO kemudian menginfiltrasi SUPP (Sarawak United People Party), partai politik legal yang dalam Anggaran Dasarnya adalah non komunis, lihat Soemadi, *op. cit.*, hlm. 54. SCO juga dikenal dengan *Clandestine Communist Organization* (CCO) sebuah organisasi yang sudah berdiri sejak Perang Dunia II, embrionya adalah *Sarawak Anti-Fascist League*, periksa James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 143.

<sup>24</sup> Wen Min Tjuen dan Wong Kee Chok adalah tokoh-tokoh komunis di Malaysia yang telah diusir dan lari ke Peking. Dari Peking kemudian dikirim untuk membantu perjuangan Partai Komunis Sarawak yang lari ke Kalimantan Barat, lihat SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.182 dan Soemadi, *op. cit.*, hlm. 54.

Komunis Cina tersebut menemui Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa dan Jacob dari *Sarawak Advance Youth Association* (SAYA)<sup>25</sup> untuk membahas garis perjuangan dari Partai Komunis Sarawak.<sup>26</sup>

Akibat dari tantangan pemerintah Malaysia yang didukung oleh Inggris dan di satu sisi didukung oleh Soekarno atas nama pemerintah Indonesia, maka tokoh-tokoh dari yang kontra dengan Federasi Malaysia “melarikan” diri ke Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat. Azahari dan Abang Kifli dengan Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU)-nya kemudian berhubungan dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh dari Sarawak, seperti Yap Chung Ho, Wong Ho, Liem Yen Hwa dan Jacob dari SUPP yang sudah disokong oleh tokoh komunis Wong Kee Chok dan Wen Min Tjun dari RRT.<sup>27</sup>

Pada tanggal 2 Desember 1963, Soebandrio, Wakil Menteri Pertama atau Menteri Luar Negeri Indonesia dan atas nama KOPERDASAN (Komando Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat. Dalam rapat-rapat umum di Pontianak dan daerah-daerah di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia, secara demonstratif Soebandrio telah memperkenalkan Azahari kepada khalayak ramai.<sup>28</sup> Dengan demikian, mulai muncul kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak NNKU, SUPP, dengan Pemerintah Indonesia.

Sebagai tindak lanjut kerja sama Azahari (Brunei), Kelompok Yap Chung Ho (Sarawak) dan Soebandrio (Indonesia) diadakanlah pertemuan di Sintang untuk menggariskan kerja sama untuk mengadakan gerakan menentang Federasi Malaysia dengan basis kekuatan di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu muncul gagasan untuk membentuk suatu pasukan bersenjata yang akan mendukung gerakan “baru” anti Malaysia. Setelah pertemuan pertama di Sintang, kemudian diadakan pertemuan lanjutan yang dilaksanakan di Bogor. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertama Soebandrio, Njoto, Soeroto, Perdana Menteri NNKU Azahari dan kelompok Yap Chung Ho dari SUPP. Dalam pertemuan itu telah diputuskan untuk membentuk pasukan bersenjata yang akan berkedudukan di perbatasan Kalimantan Barat (Asuangsang di sebelah Utara Sambas).<sup>29</sup>

Tindak lanjut dari kesepakatan di Bogor, Soebandrio dengan BPI (Badan Pusat Intelijen) Indonesia, membantu melatih 10 (sepuluh) orang anak buah Yap Chung Ho selama sebulan di Bogor. Sepuluh (10) orang yang telah dilatih oleh BPI kemudian langsung dibawa ke Asuangsang untuk melatih 60 orang pasukan lagi. Dengan basis pasukan ini, kemudian oleh SUPP “pelarian” di Kalimantan Barat dibentuklah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) sebagai bagian dari Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU).<sup>30</sup> Selain itu juga memasukkan anggota-anggota PGRS yang dipimpin

<sup>25</sup> SAYA adalah organ dari SUPP, namun sudah dimasuki pengaruh komunis. SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 182 dan Soemadi, *op. cit.*, hlm. 57. SAYA berdiri tahun 1954, pembaharuan dari *Sarawak Liberation League*, kemudian menjadi organ SCO atau CCO. Sejak awal SAYA dan SCO/CCO sudah anti terhadap Inggris, seperti kerja sama mereka dengan *Anti-British League* dari Singapura tahun 1952. Periksa James P. Ongkili, *op. cit.*, hlm. 143.

<sup>26</sup> Dalam Pembayun Sulistyorini, “Pemberontakan PGRS/ PARAKU di Kalimantan Barat, Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan, edisi 03/2004, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Pontianak, hlm. 39.

<sup>27</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 182.

<sup>28</sup> *Idem.*

<sup>29</sup> *Idem.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 183. Selain itu juga, sebagai hasil persetujuan TNKU akan menyediakan senjata untuk

Saleh sebagai anggota BPI. Dislokasi umum mereka adalah dari Pantai Barat sampai daerah Sungkung ditempati PGRS dan dari Sungkung sampai Benua Martinus di sebelah Timur ditempati PARAKU.<sup>31</sup>

#### D. Politik Konfrontasi: Dukungan Terhadap PGRS/PARAKU

Pada 10 Juni 1963 diadakan pertemuan antara perwakilan Indonesia, Malaysia dan Filipina mengenai masalah "Malaysia". Pertemuan tersebut berhasil membentuk Maphilindo, sebagai alternatif solusi bagi masalah "Malaysia".<sup>32</sup> Pada pertemuan tingkat tinggi, 30 Juli dan 5 Agustus 1963, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Filipina Diosdado Macapagal dan Perdana Menteri PTM Tunku Abdul Rahman mendukung Maphilindo dan meminta PBB menyelenggarakan jajak pendapat di Sabah dan Sarawak guna memastikan apakah rakyat kedua wilayah tersebut mau bergabung dengan Federasi Malaysia atau tidak. Keputusan KTT di Manila tersebut menghasilkan Manila *Accord* 31 Juli 1963.<sup>33</sup> Namun, jajak pendapat tidak diadakan di Brunei, sebab pada Juli 1963 wilayah tersebut telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan federasi.<sup>34</sup>

Menanggapi Manila Accord, Sekretaris Jenderal PBB, U Thant membentuk Misi Michelmores<sup>35</sup>. Misi tersebut tiba di Kalimantan pada tanggal 15 Agustus 1963, dan melaksanakan programnya tanggal 26 Agustus 1963.<sup>36</sup> Dalam jajak pendapat anggota misi berbicara dengan pemimpin-pemimpin kelompok agama, etnis dan buruh, pejabat pemerintahan, pemimpin politik, serta kepala suku di Sabah dan Sarawak. Hasilnya misi PBB tersebut menemukan bahwa mayoritas rakyat yang diwawancarai memilih untuk menggabungkan kedua wilayah mereka dengan Malaka dan Singapura dalam Federasi Malaysia. "*favored the merger of the two territories with Malaya and Singapore in the Malaysia Federation*"<sup>37</sup>

Pemerintah Indonesia dan Filipina menolak hasil tersebut, mengeluh bahwa waktu yang digunakan untuk jajak pendapat terlalu singkat. Penolakan juga diakibatkan pengamat dari kedua negara<sup>38</sup> hanya mengamati sebagian proses jajak

---

PGRS/PARAKU.

<sup>31</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 57 dan SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm 183. Basis PGRS di Sungkung, Bengkayang dan Sajingan Hulu. Sedangkan PARAKU di wilayah Benua Martinus dan Badau, Kapuas Hulu.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 384-385. Dalam Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 94., disebutkan tanggal 7 Juni dan 11 Juni 1963 telah diadakan pertemuan antara Deputi PM/Menlu Tun Abdul Razak, Menlu Soebandrio dan Menlu Pelaez dengan hasil mendukung Maphilindo dan harus diadakannya pertemuan pada tingkat Kepala Negara.

<sup>33</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, 386. Konferensi tingkat tinggi antara Pemimpin Negara Indonesia, Malaysia dan Filipina berhasil mempopulerkan pernyataan "Masalah Asia diselesaikan oleh Bangsa Asia". Lihat juga Departemen Penerangan RI, *op. cit.*, hlm. 33, 43, 53, kumpulan pidato Presiden Macapagal dan Presiden Soekarno di KTT Manila tersebut.

<sup>34</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, 386.

<sup>35</sup> Misi diketuai oleh Laurence Michelmores (Amerika Serikat) dengan anggota-anggota: George Janicek (Cekoslovakia), George Howard (Argentina), Neville Kanakaratne (Ceylon), Kenneth Danzie (Ghana), Ishad Bagai (Pakistan), Jasushi Akashi (Jepang), Abdul Dajani (Yordania) dan Jose Machado (Brazil). Lihat Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 95. Periksa juga Departemen Penerangan RI, *op. cit.*, hlm. 59.

<sup>36</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 388.

<sup>37</sup> *Idem*

<sup>38</sup> Jajak pendapat yang dilakukan Misi Michelmores juga dihadiri para peninjau dari Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dari Indonesia adalah Nugroho, Otto Abdulrahman, Teuku Hasan dan Rudi Gonta. Dari Malaysia adalah Zaiton Ibrahim, Athi Nahappan, Yakup Latief, dan Mohammad Zahir. Dari Filipina adalah Benito M. Bautista, Melquiades Ibanez, Vicente Muyoo dan Ramon

pendapat karena kesulitan yang diciptakan penguasa Inggris. Terlebih ketika pada 29 Agustus 1963 Tunku Abdul Rahman sudah mengumumkan Malaysia akan didirikan pada 16 September 1963 dan menyatakan bahwa federasi baru itu akan tetap diresmikan pada tanggal itu terlepas dari apakah hasil jajak pendapat yang diselenggarakan PBB menunjukkan bahwa rakyat Sarawak dan Sabah ingin bergabung ke dalamnya atau tidak. *“Would be established on that day whether or not the result of the U.N. survey indicated that the people of Sarawak and Sabah wanted to join the federation”*<sup>39</sup>

Tanggal 3 Mei 1964 bertempat di depan Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora atau Dwi Komando Rakyat.

“Kami Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neo-kolonialis Malaysia... dengan ini kami perintahkan kepada dua puluh satu juta Sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri:

Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk mebubarkan negara boneka Malaysia.

Semoga Rahmat dan Taufik Tuhan beserta kepada kita.

Demikian Dwikora, saudara-saudara, maka, saudara-saudara, inilah Komando Dwikora yang saya berikan kepadamu sekalian.

Kerjakan. Bismillah!”<sup>40</sup>

Menurut Lie Sau Fat atau X. F. Asali, budayawan Tionghoa Kal-Bar dan saksi sejarah, ketika peristiwa Dwikora, banyak sukarelawan membantu perang dengan Malaysia. Mereka terdiri dari para pelarian dari Sarawak, yang pada umumnya etnis Tionghoa dan partisipan komunis. Kemudian ada juga sukarelawan yang berasal dari Singkawang, Bengkayang dan berbagai wilayah di Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis seperti Melayu, Dayak, dan Tionghoa.<sup>41</sup> Selain melakukan perang langsung dengan Malaysia, Indonesia juga merekrut kelompok yang menentang pembentukan Federasi Malaysia. Kelompok tersebut adalah kelompok NNKU dan TNKU pimpinan Azahari, serta kelompok SUPP yang melarikan diri ke Kal-Bar.<sup>42</sup>

Kodam Tanjungpura pada Mei dan Juni 1964, memberikan latihan militer pada 28 orang sukarelawan dari SUPP (*Sarawak United People Party*) yang “lari” ke Kal-Bar dan juga para sukarelawan yang dikirim dari Jakarta. Latihan militer tersebut di lakukan di Dodiktif 18 - Tandjungpura di Bengkayang.<sup>43</sup> Seperti yang diungkapkan Letnan Kolonel Harsono Subardi, mantan Biro Intel POM Kodam XII

---

Barrios. Lihat Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>39</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm 389.

<sup>40</sup> ”Amanat Komando/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 3 Mei 1964.”, hlm.16, dokumen Arsip Nasional RI.

<sup>41</sup> Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (1)”, *Borneo Tribune*, Minggu, 11 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis di alamat <http://muhlissuhaeri.blogspot.com> dengan isi yang sama seperti edisi cetak surat kabar Borneo Tribune. Lihat juga La Ode, M.D., *Tiga Muka Etnis Cina-Indonesia Fenomena di Kalimantan Barat*, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1997, hlm. 117.

<sup>42</sup> Muhlis Suhaeri, “The Lost Generation (1)”, *op. cit.*

<sup>43</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm 183 dan 185. Dalam Pembayun Sulistyorini, *op. cit.*, hlm.53, disebutkan: selama masa konfrontasi 85 orang dari Sarawak telah meyeberang ke Kalimantan Barat. Mereka pada umumnya termasuk dalam *onderbouw* SUPP.

Tanjungpura, "Saat itu, kita melatih PGRS/PARAKU untuk dipergunakan membantu memerdekakan Malaysia. Mereka dilatih oleh RPKAD di Bengkayang." <sup>44</sup>

Selama periode 1963-1965 PGRS/PARAKU "membina" rakyat perbatasan yang berada di Indonesia. Tujuan penyerangan PGRS/PARAKU dan para sukarelawan diarahkan kepada Sarawak di Malaysia Timur. Targetnya untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemerintah Federasi Malaysia dan merebut Kota Kuching sebagai Ibukota wilayah Sarawak. Agar tujuan itu tercapai, mereka membentuk basis-basis strategis di Distrik Sempadi/Matan, Lundu, Nonok, Bau, Sibul, Binatang dan Semanggang, serta melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos Tentara Diraja Malaysia.<sup>45</sup>

Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui BPI (Badan Pusat Intelijen), membuat "kisah" PGRS/PARAKU tidak menjadi konsumsi publik pada tahun 1963-1965 (sebelum G 30 S). Hal ini seperti yang diuraikan L.H. Kadir, saksi sejarah, mantan Wakil Gubernur Kal-Bar 2003-2008, pada masa konfrontasi bekerja sebagai pegawai negeri di Putusibau (1963-1965) dan Mahasiswa APDN (1965-1968).

"Sekitar tahun 1963-1964 tidak ada pernyataan dukungan Indonesia terhadap PGRS/PARAKU. Masyarakat hanya tahu bahwa ada pergolakan rakyat di perbatasan. Setahu saya setelah peristiwa G 30 S baru ada di koran berita tentang PGRS/PARAKU. Sebelum itu yang dikenal sukwan... Sewaktu masih di Putusibau, saya pernah mengantar sukwan dari Putusibau untuk berlatih di perbatasan. Saya dengan *speed* ke Semitau diperintah Dandim Hartono supaya mengantar. Orang-orang yang saya antar Cina semua waktu itu. Mereka bawa senjata, ada pula *amoi-amoi*, banyak perempuan. Ada juga dokter dua orang, mereka latihan di Badau."<sup>46</sup>

Sejak bulan Januari 1965 sampai meletusnya G30S, kegiatan infiltrasi dan pertempuran ke Malaysia meningkat sehingga rakyat perbatasan di kedua belah pihak sangat terpengaruh oleh kegiatan tersebut. Pasca G30S situasi belum mempengaruhi PGRS/PARAKU, karena pemerintah belum membubarkan PKI. Situasi komando di Kalimantan Barat masih belum jelas. Satu-satunya komando yang diberikan oleh Pangdam XII/Tanjungpura adalah tetap di pos masing-masing dan mempertinggi kewaspadaan. Situasi demikian ternyata dimanfaatkan PGRS/PARAKU untuk konsolidasi kekuatan, di mana banyak simpatisan PKI yang bergabung karena situasi politik yang semakin menekan PKI.<sup>47</sup>

Pada perjalanan sejarah selanjutnya gerakan sukarelawan Indonesia akan sulit dibedakan dengan para gerilyawan PGRS/PARAKU. Mereka sama-sama memperoleh pelatihan militer dari Tentara RI dan sama-sama diterjunkan di perbatasan.<sup>48</sup> Hal ini semakin kompleks ketika PKI memanfaatkan pengerahan sukarelawan untuk melatih para kadernya, yang kebanyakan dari etnis Tionghoa, sehingga akan sulit dibedakan yang mana PGRS/PARAKU, kader PKI dan kelompok yang tidak mengetahui tentang semua itu.

---

<sup>44</sup> Muhlis Suhaeri, "The Lost Generation (1)", *op. cit.*

<sup>45</sup> Pembayun Sulistyorini, *op. cit.*, hlm. 54.

<sup>46</sup> Wawancara langsung dengan penulis pada hari Minggu, 20 Juni 2008 sekitar pukul 17.00 Wib lokasi di kediaman L.H. Kadir, jalan M.T. Haryono No. 40 Pontianak, Kalimantan Barat.

<sup>47</sup> Pembayun Sulistyorini, *op. cit.*, hlm. 56.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

## E. Penumpasan PGRS/PARAKU

Ada kelompok-kelompok dalam tubuh Angkatan Bersenjata maupun sipil di Indonesia yang menginginkan konfrontasi berakhir. Mereka yang masuk ke dalam kelompok ini adalah: Soeharto, Kemal Idris, Ali Moertopo, L.B. Moerdani, Yoga Soegomo dan A. Rachman Ramli. Dari pihak sipil ada Adam Malik dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dari pihak Malaysia adalah Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (1969-1970) Tan Sri Muhamad Ghazali bin Shafie dan staf Kementerian Luar Negeri Muhamad Sulong.<sup>49</sup> Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang melemahkan kekuatan PKI, dan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang melemahkan kekuatan Soekarno, kelompok-kelompok di ataslah yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah "Malaysia".

Menurut Hidayat Mukmin ada tiga faktor yang mendorong penyelesaian konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Pertama, faktor internal Malaysia, adanya perpecahan di dalam Federasi yang mengakibatkan Brunei dan Singapura melepaskan diri. Kedua, internal Indonesia, pergantian kekuasaan yang didasari peristiwa 30 September 1965. Ketiga, upaya kedua pihak untuk menyelesaikan konfrontasi tanpa mediasi pihak ketiga.<sup>50</sup> Dengan perkembangan historiografi yang pesat pasca Orde Baru, sulit mengatakan berakhirnya konfrontasi tanpa campur tangan pihak ketiga. Beberapa penulisan sejarah terbaru menunjukkan adanya campur tangan pihak asing dalam pergantian kekuasaan di Indonesia.

Secara khusus bagi Indonesia, alasan-alasan di atas harus ditambah dengan alasan ekonomi dan politik. Secara ekonomi, sulit bagi Indonesia yang pemerintah dan rakyatnya sedang dalam ekonomi lemah, dapat menjalankan perang dengan berhasil.<sup>51</sup> Meskipun faktanya Indonesia memiliki armada militer yang kuat dari kerja samanya dengan Uni Soviet.<sup>52</sup> Sedangkan secara politis, terdapatnya kelompok-kelompok yang politiknya berseberangan dengan Soekarno. Kelompok-kelompok ini mengidentikkan konfrontasi sebagai politik Soekarno dan PKI. Dengan melemahkan kekuasaan Soekarno Pasca G30S, mereka pun menginginkan berakhirnya politik konfrontasi.

Pada 29 Mei - 1 Juni 1966 diadakan perundingan antara Menteri Luar Negeri RI Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak di Bangkok atas bantuan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman. Perundingan yang dikenal dengan *Bangkok Talks* menghasilkan pertukaran surat-surat yang memuat prinsip-prinsip untuk suatu perjanjian bagi penyelesaian persoalan Malaysia. Puncak dari semua perundingan itu adalah ditandatanganinya suatu persetujuan antara Indonesia dan Malaysia untuk normalisasi hubungan antara kedua negara di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan itu dikenal dengan Jakarta *Accord*.<sup>53</sup> Konfrontasi baru selesai setelah ada pengakuan terhadap Malaysia seperti yang tertuang dalam pasal 1 Jakarta *Accord*. Segala sesuatu yang tercantum dalam Jakarta *Accord* hanya dapat dilaksanakan apabila tidak ada kegiatan-kegiatan permusuhan lagi antara kedua negara.

Menanggapi Jakarta *Accord*, maka KOLAGA (Komando Mandala Siaga)

<sup>49</sup> Lihat Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 106-107, 114, 129 dan 130.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>51</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm.119. Hidayat Mukmin, *op. cit.*, hlm. 113.

<sup>52</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm.124.

<sup>53</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 194.

mengeluarkan instruksi dengan radiogram tanggal 10 Agustus 1966 No. TSR-26/1966 kepada semua Komando Bawahan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan operasi. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Komando Tempur (Kopur) IV/Mandau, adalah menyerukan agar PGRS/PARAKU mengadakan konsolidasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ternyata yang mengikuti seruan tersebut hanya 99 orang, sedangkan sejumlah 739 orang membangkang.<sup>54</sup>

Akibat dari pembangkangan tersebut, maka Kopur IV/Mandau melancarkan gerakan Operasi Tertib I dan Operasi Tertib II ke daerah-daerah seperti: Gunung Sentawi/Sempatung *complex*, Sungkung *complex*, Melanjau *complex*, dan Benua Martinus *complex*. Gerakan Operasi Tertib I dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1966 sampai Desember 1966. Sedangkan Operasi Tertib II dilaksanakan sejak Januari 1967 sampai dengan Maret 1967. Pelaksana penuh Operasi Tertib I dan Tertib II adalah Kopur IV/Mandau dan langsung berada di bawah KOLAGA. Sebagai hasil dari Operasi Tertib tersebut, Kopur IV/Mandau dapat menghancurkan lima puluh persen (50%) kekuatan PGRS/PARAKU.<sup>55</sup>

Pada tanggal 17 Februari 1967 berdasarkan Surat Rahasia Pangkolaga No. 12-33/1967 wewenang pengendalian operasi dialihkan dari Kopur IV/Mandau kepada Kodam XII/Tanjungpura. Kodam XII/Tanjungpura melancarkan rentetan gerakan operasi yang dikenal dengan Operasi Sapu Bersih. Dalam perjalanannya Operasi Sapu Bersih dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: Operasi Sapu Bersih I (April 1967-Juli 1967), Operasi Sapu Bersih II (Agustus 1967-Februari 1969) dan Operasi Sapu Bersih III (Maret 1969-Desember 1969).<sup>56</sup>

Pelaksanaan Operasi Sapu Bersih I belum mencapai hasil memuaskan, pasukan yang gugur sebanyak 29 orang. Faktor-faktor kegagalan disebabkan kurangnya tenaga tempur, selain itu pihak PGRS/PARAKU lebih mengenal keadaan medan dan dapat menarik simpati kaum pribumi yaitu suku Dayak setempat.<sup>57</sup> Ditambah lagi PGRS/PARAKU mudah memencar dan menyusup ke dalam masyarakat untuk menghilangkan diri dari pengejaran. Hal itu disebabkan masyarakat dan kampung-kampung Tionghoa tersebar luas sampai daerah pedalaman seluruh Kalimantan Barat.<sup>58</sup> Penyerbuan PGRS/PARAKU di Sanggau Ledo 16 Juli 1967 terhadap Pangkalan Udara AURI, Singkawang, merupakan pukulan telak bagi tentara Indonesia. PGRS/PARAKU berhasil merampas senjata 150 pucuk.<sup>59</sup> Akibat penyerangan tersebut tiga prajurit dan satu pegawai sipil tewas. Pada penyerangan tersebut, PGRS/PARAKU meninggalkan surat kepada pihak Tentara AURI yang berbunyi: "Kami Pinjam Senjata Untuk Melawan Imperialis Inggris Malaysia."<sup>60</sup>

Dalam operasi gelombang kedua (Operasi Sapu Bersih II) kesatuan-kesatuan tempur Kodam XII/Tanjungpura telah diperkuat dengan RPKAD, Siliwangi, Kopasgat AURI, dan KKO. Operasi Sapu Bersih II menghasilkan lebih memuaskan, dibanding dengan operasi-operasi sebelumnya. Operasi Sapu bersih II ini ternyata

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 235. Hierarki dalam pelaksanaan Dwikora adalah (1) KOTI (Komando Tertinggi) dipimpin Presiden Soekarno; (2) KOGA (Komando Siaga) yang berganti nama menjadi KOLAGA (Komando Mandala Siaga) sebagai komandan gabungan angkatan-angkatan; (3) Kopur (Komando Tempur) dan Kodam (Komando Daerah Militer) sebagai pelaksana dan *supporting unit*.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>57</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>58</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm. 256.

<sup>59</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>60</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.258.

memakan waktu kurang lebih dua (2) tahun yaitu Agustus 1967 hingga Februari 1969.<sup>61</sup> Operasi-operasi militer yang dilakukan ternyata belum mampu melumpuhkan semua kekuatan PGRS/PARAKU. Dalam perjalanan selanjutnya pihak militer menggandeng suku Dayak untuk melumpuhkan kekuatan PGRS/PARAKU.

Pada tanggal 14 Oktober 1967 terjadi peristiwa yang membantu Tentara Indonesia dalam menumpas PGRS/PARAKU. Gerakan pembasmian terhadap PGRS/PARAKU dikenal dengan sebutan "Demonstrasi Suku Dayak". Gerakan ini kemudian menyebar luas menjadi luapan emosi etnis Dayak, hingga upacara "mangkok merah"<sup>62</sup> pun diadakan. Gerakan Suku Dayak ini kemudian menjadi sentimen rasial dengan mengidentikkan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS/PARAKU. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang "bulu" menjadi korban dari gerakan demonstrasi.<sup>63</sup>

Gerakan ini mengakibatkan pengungsian besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Tionghoa menuju ke Kota Pontianak.<sup>64</sup> Pengungsian ini tidak saja menimbulkan masalah di kota-kota penampungan dan derita psikis yang dialami keluarga korban pembantaian oleh etnis Dayak tersebut. Namun juga, sirkulasi perdagangan di daerah pedalaman Kalimantan Barat menjadi lumpuh. Setelah gerakan Suku Dayak terhadap PGRS/PARAKU, maka kegiatan-kegiatan PGRS/PARAKU mulai menurun intensitasnya. Tekanan-tekanan Pasukan Indonesia menyebabkan PGRS/PARAKU semakin terjepit. Putusnya jalur logistik dengan mengungsinya ribuan orang Tionghoa menyebabkan banyak anggota PGRS/PARAKU yang menyerahkan diri.

Dilihat dari sudut ekonomi dan sosial akibat yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut: (1) Putusnya aliran perdagangan yang semula dilakukan oleh pedagang-pedagang Tionghoa, maka muncul problema bagaimana mengalirkan lalu lintas perdagangan dari dan ke pedalaman; (2) Kebun dan ladang yang ditinggalkan pemiliknya menjadi terlantar yang berakibat turunnya produksi beberapa jenis komoditi Kalimantan Barat; (3) Arus pengungsi yang mengalir ke kota-kota merupakan beban yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.<sup>65</sup>

## F. Penutup

Terbentuknya Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/PARAKU) merupakan kristalisasi dari gerakan kelompok-kelompok yang menentang pembentukan Federasi Malaysia. Pihak yang secara langsung dirugikan atas pembentukan Federasi Malaysia melakukan perlawanan, yang

---

<sup>61</sup> Soemadi, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>62</sup> Upacara adat yang merupakan ajakan (solidaritas) perang, berupa sesajen yang diletakkan di mangkok dan diedarkan dari kampung ke kampung. Bagi kampung/orang yang menerimanya wajib mengirimkannya untuk berperang. Bagi masyarakat umum Mangkok Merah juga dapat dijadikan ukuran bahwa konflik/perang yang terjadi merupakan perang besar, yang membutuhkan solidaritas lintas sub-suku Dayak.

<sup>63</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.270.

<sup>64</sup> Dalam Tandjungpura Berdjung, *idem*, hlm. 277, disebutkan 50.000 orang Tionghoa mengungsi dan 250 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Menurut Tyhie Dju Khian atau Petrus yang diperolehnya dari badan dunia yang menangani pengungsi saat kejadian, ada 3.000 orang meninggal dan 70.000 mengungsi, lihat Muhlis Suhaeri, "The Lost Generation (10)", *Borneo Tribune*, Selasa, 19 Februari 2008, tulisan dikutip dari blog pribadi penulis dengan alamat <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>

<sup>65</sup> SEMDAM XII/Tanjungpura, *op. cit.*, hlm.280..

ditandai dengan terbentuknya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) dan kemudian PGRS/PARAKU. Sedangkan di luar negeri, Indonesia dan Filipina sebagai penentang utama Federasi Malaysia kemudian mendukung gerakan anti Malaysia, yang berarti mendukung NNKU dan PGRS/PARAKU.

Sikap Pemerintah Indonesia pada Orde Lama yang menentang pembentukan Federasi Malaysia menyebabkan keluarnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung PGRS/PARAKU. PGRS/PARAKU berhasil bertahan dan terus melakukan perlawanan terhadap Federasi Malaysia karena dukungan yang diberikan Pemerintah RI, bahkan PGRS/PARAKU berhasil mendapat suntikan tenaga dengan bekerja sama dengan PKI dan terbantu dengan pengerahan para sukarelawan oleh Pemerintah Indonesia.

Sikap Pemerintah Orde Baru sangat bertolak-belakang dengan Orde Lama. Dengan ditandatanganinya Jakarta *Accord*, maka konflik antara Indonesia-Malaysia berakhir. Namun, PGRS/PARAKU tidak mengakui persetujuan tersebut dan tetap menolak pembentukan Federasi Malaysia. Akibatnya Pemerintah Orde Baru menumpas PGRS/PARAKU. Operasi-operasi penumpasan yang dilakukan Tentara Indonesia, seperti Operasi Sapu Bersih dan Operasi Tertib berhasil melumpuhkan sebagian kekuatan PGRS/PARAKU. Puncaknya ketika terjadi gerakan Suku Dayak, yang pada awalnya ditujukan untuk menumpas PGRS/PARAKU, namun meluas menjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa.

## Daftar Pustaka

- Baskara T. Waradaya. 2007. *Cold War Shadow: United States Policy Toward Indonesia 1953-1963*, Yogyakarta: Galang Press.
- Departemen Penerangan RI. 1964. *Gelora Konfrontasi Menggajang Malaysia*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Hidayat Mukmin. 1991. *TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- La Ode, M.D. 1997. *Tiga Muka Etnis Cina-Indonesia Fenomena di Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Biograf Publishing.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhlis Suhaeri, 2008. "The Lost Generation (1)". *Borneo Tribune*. Minggu. 10 Februari 2008.
- \_\_\_\_\_, 2008. "The Lost Generation (10)". *Borneo Tribune*. Selasa. 19 Februari 2008.
- Ongkili, James P. 1985. *Nation-Building in Malaysia 1946-1974*. Singapura: Oxford University Press.
- Pembayun Sulistyorini. 2004. "Pemberontakan PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat". *Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan*, edisi 03/2004. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Halaman 39.
- Ricklef, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- SEMDAM XII/Tanjungpura. 1970. *Tandjungpura Berdjuang*, Pontinak: Kodam XII Tanjungpura.
- Soemadi. 1974. *Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*. Pontianak: Yayasan Tanjungpura.
- \_\_\_\_\_. Amanat Komando Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia di Depan Istana Merdeka, Djakarta, 3 Mei 1964.
- Wawancara langsung dengan L.H. Kadir, pada hari Minggu, 20 Juni 2008 pukul 17.00 Wib lokasi di kediaman L.H. Kadir, jalan M.T. Haryono No. 40 Pontianak, Kalimantan Barat.
- Muhlis Suhaeri. "The Lost Generation". <http://muhlissuhaeri.blogspot.com>